BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hipertensi merupakan suatu penyakit dengan kenaikan tekanan darah yang melebihi batas normal, yaitu nilai sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg (Kemenkes RI, 2021). Menurut data *World Health Association* (WHO) tahun 2021 terdapat 1,4 miliar orang di dunia menderita hipertensi, namun hanya 14% saja yang mampu mengendalikan penyakit tersebut. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dalam (Kemenkes RI, 2021) di Indonesia terdapat jumlah kasus hipertensi dengan persentase sebesar 34,11% pada tahun 2018 didapat melalui pengukuran umur ≥ 18 tahun, hal ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah kasus hipertensi di tahun 2013 sebesar 25,8%. Berdasarkan data sistem informasi Rumah Sakit di Jawa timur hipertensi merupakan kasus penyakit tidak menular terbanyak di Jawa timur dengan total kasus sebanyak 195.225 kasus (Dinkes Jatim, 2023). Hipertensi juga disebut sebagai penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan, sehingga membutuhkan terapi jangka panjang (Schwinghammer *et al.*, 2021). Terapi jangka panjang pada pasien hipertensi diperlukan agar tekanan darahnya selalu terkontrol sehingga terhindar dari komplikasi.

Komplikasi hipertensi dapat menimbulkan gejala seperti gangguan pada organ penglihatan, jantung, fungsi ginjal, pada serebral (otak) dan pembuluh darah perifer (Maclaughlin and Saseen, 2020). Komplikasi yang terjadi akibat hipertensi juga dapat menyebabkan kematian jika tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, komplikasi juga berdampak pada biaya pengobatan pasien. Pasien akan mendapatkan biaya pengobatan yang besar dalam penatalaksanaan hipertensi yang disertai

dengan komplikasi. Terkait masalah biaya pengobatan yang besar, pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kemudian membentuk suatu program pengelolaan penyakit kronis (prolanis).

Prolanis merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang menderita penyakit kronis dan fasilitas kesehatan dalam proses pemeliharaan kesehatan para peserta BPJS yang menderita penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes melitus (Panduan Praktis Prolanis). Program JKN berguna untuk memaksimalkan mutu pelayanan dan mempermudah pasien dalam mengakses layanan kesehatan. Melalui program ini maka dapat membantu pasien hipertensi dalam mencapai kualitas hidup yang optimal melalui biaya pelayanan yang efektif dan efisien. Program JKN berupa prolanis yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan hipertensi, sehingga mencegah terjadinya komplikasi (Panduan Praktis Prolanis).

Menurut *World Health Association* (WHO) dalam penelitian Yousuf *et al.* 2023 terdapat 50% hingga 70% pasien tidak patuh terhadap pengobatan antihipertensi yang diresepkan. Faktor ketidakpatuhan pada pasien hipertensi dibagi menjadi dua yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah yaitu jenis kelamin, umur, pekerjaan dan pendidikan, sedangkan faktor yang dapat diubah yaitu pengetahuan (Syamsudin *et al.*, 2022). Pasien yang memiliki pengetahuan baik mengenai hipertensi maka akan mempengaruhi kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat tersebut. Pengetahuan yang baik artinya pasien sudah memiliki pemahaman yang benar terkait hipertensi baik dari segi penyebab, gejala, terapi farmakologi ataupun nonfarmakologi.

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman pribadi, intuisi, dugaan dan informasi yang didapatkan melalui pancaindera manusia seperti indera pendengaran (telinga) dan penglihatan (mata) (Muid, 2020). Pengetahuan seseorang bisa diperoleh melalui wawancara dengan menanyakan terkait hal yang ingin diketahui dari seseorang. Pengetahuan yang perlu didapatkan oleh pasien hipertensi yaitu informasi singkat terkait penyakit hipertensi, obat hipertensi dan nonobat (gaya hidup). Informasi yang diberikan terkait penyakit hipertensi meliputi definisi singkat hipertensi, penyebab dan gejala terjadinya hipertensi serta penjelasan terkait obat-obat yang dikonsumsi meliputi nama obat apa yang dikonsumsi, dosis, terapi farmakologi atau nonfarmakologi serta bahaya yang muncul akibat tidak minum obat (Sahadewa *et al.*, 2019).

Pengetahuan terkait penyakit hipertensi dapat diperoleh pasien melalui pelayanan informasi obat oleh apoteker di layanan kesehatan. Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Permenkes Nomor 34 Tahun 2021, dalam memberikan layanan kefarmasian. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan optimal dan bermutu serta mampu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien (*patient safety*). Apoteker memiliki peran dalam memberikan pelayanan informasi obat yang lengkap berupa edukasi sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi pada pasien hipertensi (Pare *et al.*, 2020). Pelayanan informasi obat yang dapat mencegah terjadinya komplikasi tersebut dapat berupa pemberian edukasi dan informasi yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian kepada pasien mengenai bahaya jika tidak mengkonsumsi obat secara teratur serta memberikan edukasi tentang dampak yang terjadi apabila menerapkan gaya hidup yang tidak sehat. Pelayanan informasi ini diharapkan dapat mengubah pengetahuan pasien terkait penyakit dan obat hipertensi yang diterima serta

dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat hipertensi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2023) kriteria pasien dikatakan patuh jika pasien tersebut meminum obat 100% artinya pasien meminum seluruh obat yang diterima tanpa ada sisa. Kriteria pasien dikatakan tidak patuh yaitu jika pasien tidak meminum obat 100% artinya pasien tidak meminum seluruh obat yang diterima dalam arti masih ada obat yang sisa. Pasien yang tidak patuh terhadap pengobatan dapat meningkatkan tekanan darah dan pasien yang patuh terhadap pengobatan tekanan darahnya akan selalu terkontrol, sehingga pasien terhindar dari terjadinya komplikasi penyakit hipertensi. Pasien patuh terhadap pengobatan maka tensinya stabil serta pasien yang tidak patuh terhadap pengobatan ditunjukkan dengan tensi yang tinggi.

Pentingnya pengetahuan berupa informasi yang didapatkan oleh pasien hipertensi dalam meningkatkan kepatuhan melalui pelayanan informasi obat di layanan kesehatan menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan pada fasilitas layanan kefarmasian klinik, sebagai sarana pelayanan. Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang evaluasi pelayanan edukasi tenaga kefarmasian terhadap peserta JKN penyandang hipertensi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Informasi apa yang diterima oleh peserta JKN penyandang hipertensi melalui pelayanan tenaga kefarmasian di klinik sesuai dengan Permenkes Nomor 34 Tahun 2021?
2. Bagaimana efektivitas pelayanan edukasi tenaga kefarmasian dalam membantu pasien hipertensi di klinik untuk memahami proses pengobatan yang sedang dijalani?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui informasi yang diterima oleh peserta JKN penyandang hipertensi melalui pelayanan tenaga kefarmasian di klinik sesuai dengan permenkes nomor 34 tahun 2021.
2. Mengetahui efektivitas pelayanan edukasi tenaga kefarmasian dalam membantu pasien hipertensi di klinik untuk memahami proses pengobatan yang sedang dijalani.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan sesama tenaga kefarmasian untuk meningkatkan kualitas layanan kefarmasian dalam memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien hipertensi sehingga dapat meningkatkan eksistensi peran apoteker.